

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TES KESEHATAN DAN JASMANI DALAM PROSES REKRUTMEN SELEKSI BINTARA POLRI UNTUK MENGIKUTI SEKOLAH INSPEKTUR POLISI (SIP) DI POLDA JAWA TIMUR

Erwan Hartanto¹⁾, Priyanto²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo
Email: erwanunitomo@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan Tesis Ini Menganalisis mekanisme Tes Kesehatan dan jasmani pada proses seleksi bintara Polri untuk mengikuti seleksi SIP di Polda Jawa Timur sesuai dengan analisis model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (2002), model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, b. Sumber daya, c. Karakteristik organisasi pelaksana, d. Sikap para pelaksana, e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian wawancara guna memperoleh data primer mengenai implementasi kebijakan tes kesehatan dan jasmani dalam proses rekrutmen seleksi bintara polri untuk mengikuti sekolah inspektur polisi (SIP) di Polda Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan seleksi Sekolah Inspektur Polisi yang diadakan di Polda Jatim berjalan dengan lancar. Tugas yang diberikan oleh panitia pusat berupa sosialisasi, pendaftaran, dan pemeriksaan berkas. Untuk selanjutnya akan ditangani panitia pusat dan tugas panitia daerah membantu membuat laporan kegiatan. Proses sosialisasi berjalan dengan baik, namun kendala yang cukup berarti ada pada sistem jaringan internet halaman pendaftaran. Web tidak dapat dibuka ketika mendekati penutupan pendaftaran. Hal ini menyebabkan harus dibukanya pendaftaran off line. Sementara itu proses seleksi rekmin tahun 2018 lebih ketat dari tahun sebelumnya. Persiapan seperti sumberdaya, sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, komunikasi, dan lingkungan perlu ditambah lagi. Terutama dalam sumberdaya IT agar tahun depan bisa online 100%

Kata Kunci : Implementasi, Kesehatan, Sekolah Inspektur Polisi.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to analyze the mechanism of health and physical tests in the selection process for police officers to participate in the SIP selection at the East Java Regional Police in accordance with the analysis of the policy implementation approach model formulated by Van Meter and Van Horn called the A Model of the Policy Implementation (2002), the model This explains that policy performance is influenced by several interrelated variables, these variables are: a. Policy standards and objectives/policy measures and objectives, b. Resources, c. Characteristics of implementing organizations, d. Attitudes of implementers, e. Communication between related organizations and implementation activities, f. Social, economic and political environment.

The method used in this research is descriptive qualitative method, where the main instrument in the research is the researcher himself. The data sources used are primary sources and secondary data related to the empirical situation and conditions of policy implementation. In this study, the authors also used interview research to obtain primary data regarding the

implementation of the health and physical test policy in the recruitment process for the selection of the National Police Officers to attend the Police Inspector School (SIP) at the Polda East Java.

The results showed that the implementation of the Police Inspector School selection held at the East Java Regional Police went smoothly. The tasks given by the central committee are in the form of socialization, registration, and examination of files. In the future, the central committee will handle the task of the regional committee to help make activity reports. The socialization process went well, but there were significant obstacles in the internet network system on the registration page. The web cannot be opened when the registration closes. This causes the need for offline registration to be opened. Meanwhile, the 2018 recmin selection process was more stringent than the previous year. Preparations such as resources, policy objectives, organizational characteristics, communication, and environment need to be added. Especially in IT resources so that next year can be 100% online.

Keywords: Implementation, Health, Police Inspector School

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan zaman saat ini peranan Teknologi Informasi dalam sebuah Institusi kepolisian sudah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sebuah organisasi modern. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada 4 (empat) macam Sumber Daya fisik yang dimiliki suatu organisasi yaitu Manusia, Material, Mesin dan Uang, sebuah organisasi memerlukan pula Sumber Daya Konseptual yaitu Informasi. Di dalam institusi Kepolisian sangat dituntut dalam hal peningkatan SDM terhadap anggota Kepolisian agar dapat meningkatkan perlindungan dan kinerja operasional sehingga benar-benar bisa menjadi anggota Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, oleh karena itu panitia Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dituntut transparan dan tepat dalam pemilihan seorang anggota Kepolisian yang ingin melakukan pengajuan Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dengan kriteria yang sudah tercantum pada pedoman administrasi dan Panduan Diktuk Dikbang tentang Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) yang dimana secara umum pengajuan oleh seorang anggota kepolisian, Bintara ke Perwira maksimal berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) atau yang

berpangkat lainnya sesuai kebijaksanaan Pimpinan Polri.

Setiap tahunnya begitu banyaknya pendaftar juga bagian dari panitia seleksi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon pendaftar untuk mulai pendaftaran hingga pengumuman lulus, ada beberapa tahapan diantaranya pendaftaran, Tes tulis, Tes Psikologi dan Tes Kesehatan serta Jasmani. Diantaranya Aspek yang dinilai dalam tes psikologi meliputi kecerdasan kepribadian dan sikap kerja. Tujuan tes untuk mengungkap potensi psikologis dari calon peserta. Dari aspek kecerdasan akan diungkap kemampuan berpikir praktis, verbal, logis dan analitis. Lalu dari aspek kepribadian akan diungkap potensi stabilitas emosi, prososial, penyesuaian diri, kepercayaan diri, pengambilan keputusan, dan motif berprestasi. Sedangkan dari aspek sikap kerja akan diungkap potensi kecepatan kerja, ketelitian kerja, dan ketahanan kerja.

Metode tes dilakukan dengan tes tertulis. mekanisme tes dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Itu lantaran penyiapan materi tes dilaksanakan oleh Tim Pokja. Sebelum menyusun materi, masing-masing anggota tim menanda tangani pakta integritas untuk senantiasa menjaga kerahasiaan.

Dalam penyusunan materi kami juga melibatkan pengawas internal dan setiap selesai pelaksanaan tugas membuat berita acara. Materi tes yang dibuat dimasukan kedalam CD dan diberi password kemudian disegel dan disimpan oleh pengawas internal.

Pada hari pelaksanaan tes, materi tes dibawa ke tempat tes. Lalu materi tes dibuka didepan peserta dan pengawas internal. Mereka lalu meminta password yang dimiliki petugas posko pada Biropsikologi SSDM Polri. Setelah mendapatkan password, dilakukan penggandaan materi langsung di tempat tes. Langkah ini dilakukan untuk menjamin materi tes tidak bocor. Tak berhenti disini, untuk menjamin proses ini fair, koreksi langsung dilakukan usai tes dengan sistem komputerisasi. Semua ini dilakukan di depan peserta tes sehingga peserta dapat melihat proses koreksi dan langsung melihat hasilnya pada layar monitor.

Untuk melakukan koreksi, panitia harus kembali meminta password kunci jawaban ke panitia pusat yang berada di Posko Biropsikologi SSDM Polri. Sebelum diberikan password panitia daerah harus mengirimkan hasil scanner lembar jawaban komputer kepada Posko. Berbagai langkah pengamanan ini dilakukan juga untuk kontrol kepada panitia pusat agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses koreksi. Proses seleksi yang ketat ini dilaksanakan agar Polri benar-benar mendapatkan calon peserta SIP yang berkualitas yang pada gilirannya itu untuk mendapatkan perwira Polri yang unggul dan kompetitif.

Pemeriksaan kesehatan wajib dilalui dalam tahap seleksi agar calon perwira melalui jalur SIP ini dipastikan benar-benar memiliki kesehatan prima sesuai yang disyaratkan, Tes Kesehatan dan Jasmani adalah syarat mutlak tidak bisa ditawar dan perkecualian, Adapun

pemeriksaan kesehatan meliputi rikkes TB/BB, rikkes mata (visus dan buta warna), rikkes fisik (kelainan fisik luar), rikkes TD/ND, rikkes THT, rikkes gigi, EKG, treadmill, laboratorium serta foto radiologi, Setelah dinyatakan memenuhi syarat pada pemeriksaan kesehatan, selanjutnya peserta mengikuti ujian kesehatan jasmani, priksaan psikologi dan ujian akademik.

Agar lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri melalui jalur SIPSS, peserta perlu mengetahui sejumlah penilaian yang berlaku. Pertama, tahapan tes dilakukan melalui panitia daerah dan panitia tingkat pusat. Di tingkat panitia daerah berlaku sistem gugur. Adapun pemeriksaan dan tes meliputi beberapa hal.

Pertama, pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif. Selanjutnya uji tes kompetensi keahlian aspek pengetahuan dengan penilaian kuantitatif, kemudian pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif

Berikutnya adalah tes psikologi tertulis dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif, disusul pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif, serta penelusuran mental kepribadian (PMK) dengan penilaian kualitatif. Setelah PMK, dilakukan pemeriksaan administrasi akhir dan penentuan kelulusan akhir dengan penilaian kualitatif Lolos di tingkat daerah, peserta akan mengikuti seleksi tingkat pusat yang juga berlaku sistem gugur dan/atau sistem rangking. Seleksi di tingkat pusat meliputi pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif, kemudian pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk kesehatan jiwa) dengan penilaian MS/TMS (memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat) dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian tes kompetensi manajerial dengan penilaian

kuantitatif, juga ada tes kompetensi keahlian aspek keterampilan dan perilaku (praktek sesuai profesi/prodi) peserta dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif. Tahap berikutnya adalah tes kesamaptaaan jasmani dengan penilaian kuantitatif, lalu tes psikologi/wawancara dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif. Dilanjutkan dengan penelusuran mental kepribadian (PMK)/wawancara dengan penilaian kualitatif

Adapun penentuan kelulusan akhir menggunakan penilaian kualitatif. Sedangkan penilaian Tes Psikologi berpedoman pada Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan menetapkan hasil akhir tes psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS), nilai akhir minimal 61," demikian disebutkan dalam keterangan penerimaan siswa SIPSS dari Mabes Polri.

Sementara untuk penilaian Tes Kesamaptaaan Jasmani berpedoman pada Keputusan Kapolri Nomor: Kep/399N/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kemampuan Jasmani, Renang, dan Pemeriksaan Anthropometri untuk Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri dengan Nilai Batas Lulus Akhir Jasmani adalah 41 dengan mengabaikan nilai 0 pada setiap item tes.

Dari latar belakang diatas masih banyak beberapa kendala dalam tes seleksi melalui tes kesehatan dan jasmani, harus melibatkan beberapa tenaga medis dan profesi kesehatan, dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi beberapa kendala dan penghambat dalam proses seleksi dan nantinya akan menjadi bagian

masukannya rekomendasi kedepan dalam implementasi kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Polri berkaitan dengan seleksi SIP Polri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

Bagaimana mekanisme Tes Kesehatan dan jasmani pada proses seleksi bintara Polri untuk mengikuti seleksi SIP di Polda Jawa Timur?

B. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Dengan ruang lingkup yang lebih sempit, Wilson dalam Solichin Abdul Wahab (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Hal senada dikemukakan oleh James E. Anderson dalam Ulul Albab (2007) yang mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Berbagai pengertian mengenai kebijakan publik sebagaimana tersebut di atas membawa implikasi terhadap konsep kebijakan publik itu sendiri, beberapa konsep dan karakteristik kebijakan publik tersebut menurut Solichin Abdul Wahab (2012) antara lain:

Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.

Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada

tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan.

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru diperlukan.

Menurut James A. Anderson, dkk. dalam Tilaar dan Nugroho (2005) proses kebijakan itu melalui beberapa stages sebagai berikut:

- a. *Policy Agenda*, yaitu *those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.*
- b. *Policy Formulation*, yaitu *the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.*
- c. *Policy Adoption*, yaitu *the development of support for a specific proposal so that policy can legitimated or authorized.*
- d. *Policy Implementation*, yaitu *application of the policy by the government's administrative machinery to problem.*
- e. *Policy Evaluation*, yaitu *effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not.*

Pakar lain, Dye mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk. tersebut.

Menurut Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. *Identification of Policy Problem.*
- b. *Agenda Setting.*
- c. *Policy Formulation.*
- d. *Policy Legimitation.*
- e. *Policy Implementation.*
- f. *Policy Evaluation.*

Di model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (agenda setting) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk.. Selain itu Dye juga menggantikan tahap policy adoption dengan policy legitimation. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Menurut Nugroho (2008) model-model kebijakan dari Easton, Anderson, dkk maupun Dye, Dunn di atas memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari formulasi menuju implementasi, untuk mencapai kinerja kebijakan.

Dari teori-teori proses kebijakan kita dapat melihat tiga kata kunci yakni "formulasi, "implementasi", dan "kinerja". Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mengenai implementasi kebijakan, Nugroho (2008) menyatakan Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain

itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya/resources paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam kaitan ini, seperti yang dikemukakan oleh Ujodi dalam Wahab (1990) yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang terpenting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab 1990).

Lebih jauh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (Wahab 1990) merumuskan proses Implementasi adalah :

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan.

Jadi implementasi atau pelaksanaan dapat dikatakan merupakan kemampuan yang tersusun untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang hendak tercapai.

Program Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi

sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994).

Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward III (1980), menyebutnya : Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni : komunikasi, sumber daya manusia, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kebijakan publik.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep implementasi maka perlu diketahui beberapa teori dan model implementasi. Untuk diketahui bahwa teori dan model implementasi kebijakan itu ada 6 masing-masing mengidentifikasi variabel tentang implementasi. Ada beberapa teori yang menyebut variabel yang sama dan ada juga yang berbeda, antara lain :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan sebagai variabel implementasi dapat dijumpai pada teori/model Van Meter dan Van Horn (1975), menurut mereka, keberhasilan implementasi kebijakan itu ditentukan oleh ada dan tidak adanya standar dan sasaran kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak mempunyai standar dan sasaran, maka kebijakan itu akan sulit diimplementasikan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya (*resources*) sebagai variabel implementasi dapat dijumpai pada teori/model Van Meter dan Van Horn (1975), Edward III (1980), dan Cheema & Rondinelli (1983). Dinyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik, perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*). Sumber daya manusia bisa berupa kompetensi implementor. Sedangkan sumber daya non manusia bisa berupa finansial.

c. Komunikasi

Komunikasi sebagai variabel implementasi dapat dijumpai pada

teori/model Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975), dan Cheema & Rondinelli (1983). Dinyatakan bahwa faktor komunikasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dan berhasil dengan baik, para implementator kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu diperlukan komunikasi dan sosialisasi secara baik dan benar kepada implementator, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Selanjutnya implementator harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target group*). Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui dan dipahami secara baik oleh kelompok sasaran, dikhawatirkan memunculkan resistensi yang pada gilirannya mengganggu atau bahkan menggagalkan implementasi kebijakan. Secara khusus, Van Meter dan Van Horn memberi penekanan variabel komunikasi ini pada hubungan antar organisasi. Dinyatakan bahwa pada umumnya implementasi sebuah program oleh organisasi tertentu, tidak bisa tidak (harus) melibatkan organisasi lain. Cheema dan Rondinelli juga memberikan penekanan yang sama variabel komunikasi ini pada hubungan antar organisasi. Bedanya Cheema dan Rondinelli menjabarkan secara lebih detail, yaitu bahwa hubungan antar organisasi itu meliputi :

- a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program ;
- b. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas ;
- c. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi;
- d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi;
- e. Efektivitas jaringan untuk mendukung program.

d. Disposisi

Disposisi sebagai salah satu variabel implementasi kebijakan dapat dijumpai pada teori/model Van Meter & Van Horn (1975) dan Edward III (1980). Disposisi adalah sifat kecenderungan yang dimiliki implementor. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat mengimplementasikan kebijakan. Sebaliknya, jika implementor memiliki disposisi yang tidak baik, maka dia tidak akan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Disposisi menurut Edward III adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Ada 3 watak yang termasuk dalam disposisi, yaitu:

- 1) Komitmen.
- 2) Kejujuran.
- 3) Sifat demokratis implementor.

e. Karakteristik Implementor

Yang dimaksud karakteristik implementor menurut Van Meter dan Van Horn adalah karakteristik yang mencakup :

- 1) Karakteristik birokrasi implementor
- 2) Norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi implementor

Sementara itu, Rondinelli merumuskan karakteristik implementor dalam kaitannya dengan kemampuan implementor. Karena itu, Rondinelli menyebut variabel ini sebagai variabel karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana. Yang meliputi :

- 1) Ketrampilan teknis, ketrampilan manajerial dan ketrampilan politis ;
- 2) Kemampuan mengkoordinir, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan;
- 3) Dukungan dan sumber daya politik;
- 4) Sifat komunikasi internal;
- 5) Hubungan yang baik antara instansi dan kelompok sasaran;
- 6) Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak luar pemerintah;

- 7) Kualitas pimpinan instansi yang bersangkutan;
- 8) Komitmen implementor terhadap program implementasi;
- 9) Kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

f. Struktur Birokrasi dan Lingkungan Kebijakan

Menurut Edward III, jika dilihat dari sisi pemerintah, diantara variabel implementasi kebijakan, maka variabel struktur birokrasi merupakan variabel yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana birokrasi pemerintah, khususnya yang berfungsi dan bertugas sebagai agen pelaksana kebijakan, terstruktur dengan baik. Struktur organisasi yang pendek (simpler) lebih menjamin efektivitas kerja, lebih memudahkan pengawasan serta menjadikan aktivitas birokrasi fleksibel. Sebaliknya, struktur birokrasi yang panjang (komplek) kurang menjamin efektivitas kerja, menyebabkan sulitnya dilakukan pengawasan dan birokrasi tidak fleksibel.

g. Isi (substansi) Kebijakan

Isi kebijakan (*content of policy*) sebagai variabel implementasi dikemukakan oleh Grindle (1980). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (*target groups*) termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *targetgroup*;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program kerja sudah tepat;
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- 6) Apakah sebuah program implementasi sudah didukung oleh sumber daya yang memadai.

h. Lingkungan Implementasi

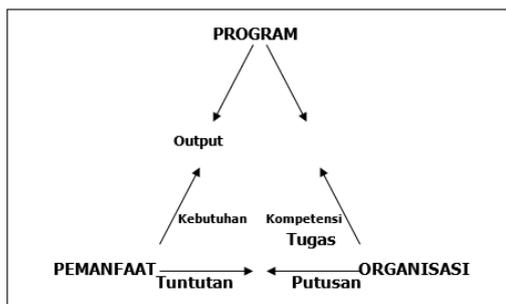
Lingkungan implementasi (Context of Implementation) sebagai variabel implementasi dikemukakan oleh Grindle (1980). Variabel ini mencakup :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi Kebijakan Model David C. Korten

Gambar 2.1 Model Kesesuaian



Sumber : David C. Korten (2000)
dalam Tarigan

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat

dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain, pemanfaat dan organisasi juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindl.

b. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn

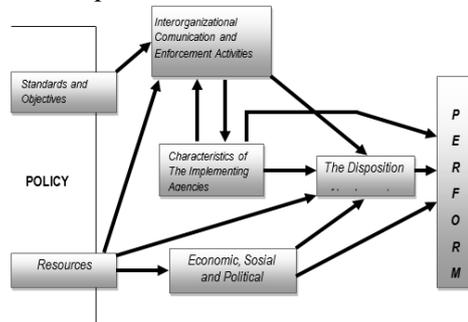
Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (2002). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- Sumber daya
- Karakteristik organisasi pelaksana
- Sikap para pelaksana
- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hubungan keenam variabel tersebut dapat disarikan pada gambar seperti dibawah ini :

Gambar 2.2 A Model of The Policy Implementation Process



Sumber : Van Meter and Van Horn (1975)

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

- Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal

(utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors).

Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

- Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New

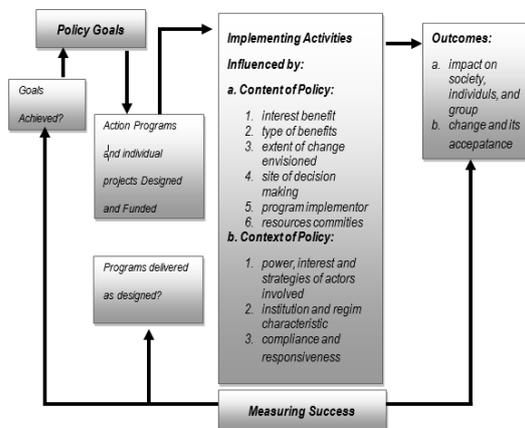
town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: ”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar

pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

c. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Gambar 2.3 *Implementation As A Political and Administrative Process*



Sumber : Grindle, 1980

Keberhasilan implementasi, akan dipengaruhi sifat atau jenis kepentingan yang hendak dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Jenis kebijakan tertentu, akan memiliki dampak tertentu terhadap aktivitas proses implementasi (Grindle, 1980). Sebaliknya, kebijakan yang bersifat redistributif, akan cenderung mudah mengundang munculnya konflik kepentingan, sehingga akan relatif sulit diimplementasikan (Ripley, 1985).

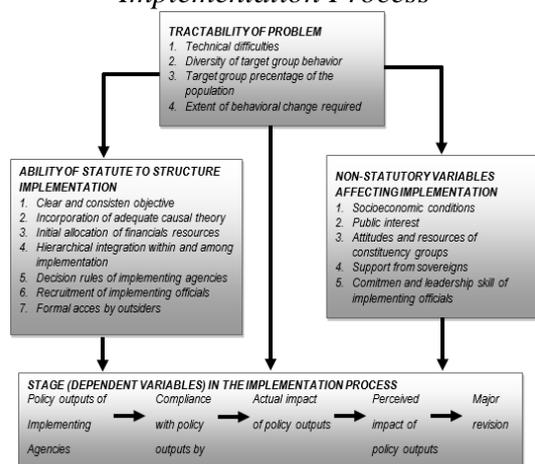
Tingkat perubahan perilaku yang hendak dicapai pada kelompok sasaran, merupakan cara lain bagaimana isi kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Program atau kebijakan yang dirancang mencapai sasaran jangka panjang untuk menimbulkan perubahan cukup besar pada masyarakat, pada umumnya akan relatif sulit diimplementasikan dibanding program yang dirancang untuk mencapai perubahan yang lebih sederhana. Isi kebijakan juga dapat menentukan rentang kendali pengambilan keputusan. Misalnya, kebijakan moneter pada umumnya akan lebih tergantung pada sejumlah unit pengambilan keputusan yang relatif terbatas. Sebaliknya, kebijakan perumahan atau pertanian, akan melibatkan sejumlah besar unit organisasi atau individu dari pusat sampai daerah. Kebijakan yang rentang kendali keputusan melibatkan berbagai unit atau individu, akan relatif sulit diimplementasikan dibanding kebijakan dimana rentang pengambilan keputusan relatif terbatas.

Isi kebijakan, dengan demikian merupakan faktor penting yang ikut menentukan hasil implementasi kebijakan. Namun dampak nyata faktor isi kebijakan, akan tergantung pada kondisi lingkungan kebijakan. Baik itu lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Implementasi akan melibatkan sejumlah aktor. Berbagai aktor ini dapat mengajukan dan membuat tuntutan tertentu, atau ikut mempengaruhi keputusan tentang alokasi sumberdaya yang tersedia. Keterlibatan berbagai aktor ini, dapat berlangsung intensif atau marginal, tergantung pada kepentingan mereka terhadap kebijakan, posisi kekuasaan yang mereka memiliki, serta strategi keterlibatan aktor dalam proses implementasi.

Adanya keterlibatan berbagai aktor, berpotensi melahirkan problem bagi aparat pelaksana untuk menjamin diperolehnya kepatuhan dari berbagai aktor tersebut, serta bagaimana dapat menjamin adanya daya tanggap para aparat pelaksana terhadap berbagai kepentingan yang mencul dari berbagai lapisan. Problem yang sering muncul adalah bagaimana menjamin adanya daya tanggap yang memadai agar implementor memungkinkan dapat meningkatkan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik. Aktivitas dan hasil implementasi akhirnya tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi struktur politik dan tipe rezim politik yang ada. Daya tanggap implementor sering menjadi problem akibat pola kekuasaan yang lebih bercorak sentralistis, sehingga ia tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan kondisi sosial politik dan ekonomi di tingkat regional atau lokal. Demikian pula manfaat program seringkali menyimpang dari sasaran utama, akibat kelompok sasaran tidak memiliki akses memadai ke dalam proses implementasi.

d. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian

Gambar 2.4 Variable Involved In The Implementation Process



Sumber : Mazmanian (1983)

Setiap kebijakan, pada dasarnya dapat menstrukturkan implementasi melalui

sarana kejelasan tujuan dan prioritas tujuan, mekanisme seleksi pelaksana, penyediaan dukungan sumberdaya bagi pelaksana, tersedianya teori kausalitas yang memadai, tingkat integrasi hierarki di dalam dan antar organisasi, ketersediaan aturan-aturan pembuatan keputusan dalam proses implementasi, pola rekrutmen aparat pelaksana dan penataan akses formal dari pihak luar dalam proses implementasi.

Kejelasan tujuan dan prioritasnya, akan dapat menjadi sumberdaya guna mendukung kemudahan memahami secara tepat terhadap sasaran yang hendak dicapai. Implementasi juga akan membutuhkan danya teori yang memadai untuk memahami prinsip kausalitas dalam pencapaian tujuan. Prinsip kausalitas ini dapat mencakup keterkaitan antara intervensi pemerintah dengan pencapaian tujuan kebijakan, dan prinsip tanggungjawab utama lembaga pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kegagalan dapat terjadi, apabila ternyata tidak didukung tersedianya teori yang memadai untuk memahami kausalitas sebagai pencapaian tujuan kebijakan. Ketersediaan sumberdaya, terutama yang berupa sumberdana, juga merupakan faktor kritikal dalam setiap implementasi kebijakan. Ketersediaan sumberdana akan mempengaruhi penyediaan tenaga pelaksana, pengembangan teknik pelaksanaan kegiatan, administrasi penanganan implementasi, dan pengendalian untuk menjamin diperolehnya dukungan dan kepatuhan.

Derajat integrasi hirarkhi di antara lembaga yang terlibat, juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Problem implementasi akan muncul apabila berbagai lembaga yang terlibat tersebut saling memiliki kewenangan yang relatif sama (seimbang), tetapi tidak didukung adanya struktur kewenangan yang terintegrasi

dengan baik. Sehingga setiap lembaga memiliki peluang relatif besar untuk merintang langkah yang hendak diambil oleh pihak lain. Demikian pula, pola-pola pengaturan pengambilan keputusan, seperti siapa pihak yang terlibat dan siapa pemegang kendali, akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidakjelasan pola pengaturan pengambilan keputusan, akan mendorong munculnya problem pengambilan keputusan yang akhirnya dapat menghambat kelancaran proses implementasi itu sendiri.

Keberhasilan implementasi juga akan lebih terjamin apabila didukung adanya komitmen yang relatif tinggi pihak implementor terhadap tujuan kebijakan dan penataan akses formal yang disediakan kepada kelompok di luar jajaran lembaga pelaksana. Khususnya kelompok sasaran penerima manfaat kebijakan maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Disamping faktor kebijakan itu sendiri, hasil implementasi merupakan fungsi dari dinamika struktur legal dan proses politik. Proses politik yang terjadi pada lingkungan, akan dapat menentukan derajat kelancaran dan keberhasilan implementasi dalam mencapai tujuan kebijakan. Variasi kondisi sosial ekonomi, dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang masalah atau tujuan kebijakan yang hendak dicapai. Kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi implementasi melalui faktor perubahan kepentingan kelompok, dukungan publik maupun dukungan pejabat tingkat atas terhadap lembaga pelaksana.

Opini publik dapat mempengaruhi implementasi dengan berbagai cara, yaitu melalui pembentukan agenda tentang masalah yang hendak dipecahkan dalam proses implementasi, atau melalui pembentukan dukungan publik yang pada gilirannya akan menentukan pelaksana

untuk melanjutkan proses implementasi atau bahkan menghentikannya. Sedangkan dukungan pejabat di tingkat atas, dapat berupa jumlah dan bentuk pengarahan yang diberikan, penyediaan dukungan sumberdana, dan pemberian kewenangan untuk menangani konflik yang muncul.

Formulasi faktor-faktor determinan implementasi kebijakan, baik dalam tataran teoritik maupun studi empirik yang dilakukan berbagai akademisi di atas, menunjukkan kecenderungan terjadinya keragaman dan bahkan perbedaan yang cukup tajam. Terutama dalam bentuk nomenklatur (penyebutan) variabel dasar dan spesifikasi faktor determinan pada masing masing variabel dasar determinan implementasi kebijakan. Namun demikian, dalam perkembangan studi implelementasi kebijakan dari waktu ke waktu, ada kecenderungan ke arah penekanan akan pentingnya melihat implementasi kebijakan lebih sebagai proses administrasi dan sekaligus sebagai proses politik. Dimana keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh tiga kelompok besar variabel independen yaitu, variabel isi kebijakan (*content of policy*), variabel administrasi kebijakan (*administrative of policy*), dan variabel lingkungan kebijakan (*context of policy*).

Berdasarkan pada uraian mengenai implementasi kebijakan diatas dapat diketahui perbedaan masing-masing pendapat tokoh. Mengingat kebutuhan akan konsep yang sesuai dengan penelitian yang digunakan maka dengann berbagai pertimbangan yang ada peneliti menggunakan model implementasi kebijakan model Grindle. Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka penelitian akan menggunakan model implementasi kebijakan sebagai proses administaasi dan proses politik.

3. Pelayanan Publik

Menurut UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan. Profesionalisme dalam pelayanan publik ini sangat dibutuhkan. Artinya ada akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan sehingga etos kerja dan budaya pelayanan merupakan cara dan kiat menciptakan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Menurut Nurmandi (1999) Pelayanan publik mempunyai beberapa ciri yaitu:

- a. Tidak dapat memilih konsumen, artinya setiap masyarakat yang datang dan membutuhkan pelayanan harus diperlakukan secara baik.
- b. Peranannya dibatasi oleh undang-undang, artinya dalam menjalankan tugas melayani kepentingan masyarakat, tetap ada norma, aturan dan ketentuan yang menjadi batas dan dasar.
- c. Politik menginstitutionalkan konflik, artinya berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi sering merupakan dampak dari politik
- d. Pertanggungjawaban yang kompleks, karena mengatasnamakan negara maka dalam pelayanan publik ada berbagai prosedur yang tetap harus dijalankan

- e. Sangat sering diteliti
- f. Semua tindakan harus mendapat justifikasi
- g. Tujuan atau output sulit diukur atau ditentukan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut Sugiyono, (2008) yaitu: "Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan".

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Cresswell, 1998). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Fokus Penelitian

Menganalisis mekanisme Tes Kesehatan dan jasmani pada proses seleksi bintanga Polri untuk mengikuti seleksi SIP di Polda Jawa Timur sesuai dengan analisis model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan

A Model of the Policy Implementation (2002), model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

3. Sumber dan Jenis data

Dalam penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber yang sasaran penelitiannya, berupa data kuantitatif (angka angka / skor) yang dihimpun dari pertanyaan dalam wawancara peneliti. Data-data hasil wawancaraini menjadi informasi utama dalam melakukan pembahasan hasil penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data baik berupa angka-angka ataupun keterangan-keterangan lain yang bersumber dari dokumen lembaga / instansi terkait, bersifat sebagai informasi pendukung bagi pembahasan hasil penelitian. Untuk mendapatkan data skunder dilakukan melalui data dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data yang bersumber dari implementasi Panitia Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dalam rangka pelayanan publik di Polda Jawa Timur, maupun data skunder lain yang di terbitkan oleh instansi terkait lainnya yang menunjang dalam penelitian.

4. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini akan menggunakan tehnik purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut Sugiyono

(2007) purposive sampling adalah tehnik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang menjadi sumber informasi data dalam penelitian ini adalah merekayang memenuhi kriteria di atas. Sehingga sasaran informan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tes kesehatan dan jasmani dalam proses rekrutmen seleksi bintara polri untuk mengikuti sekolah inspektur polisi (SIP) di Polda Jawa Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bogdan Taylor (dalam Moleong, 2005) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Maka untuk mendapatkan data, penelitian ini dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara
Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.
- b. Observasi
Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.
- c. Dokumen
Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data yang di lakukan secara Kualitatif dengan cara berulang-ulang dan

berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan teknik analisis (dalam Sugiyono, 2007) Model ini terdiri dari 2 (Dua) langkah yaitu:

1. Metode Induktif yaitu cara menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan dengan merumuskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke bentuk yang lebih umum.
2. Metode Deduktif yaitu cara menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan dengan merumuskan beberapa hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal yang bersifat khusus.

Dari data tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada dan peraturan-perturanyang berlaku, kemudian disusun kembali secara sistematis dalam bentuk Tesis.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam kaitan ini, seperti yang dikemukakan oleh Ujodi dalam Wahab (1990) yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang terpenting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab 1990).

Lebih jauh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (Wahab 1990) merumuskan proses Implementasi adalah :

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan.

Sedangkan dalam Cheema dan Rondinelli (Wibawa, 1994), Implementasi adalah sebagai berikut :

"Dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan. Dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi diantara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan.

Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengatakan bahwa definisi implementasi adalah :

Memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disyahnkannya pedomam-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat (Wahab 1990).

Jadi implementasi atau pelaksanaan dapat dikatakan merupakan kemampuan yang tersusun untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang hendak tercapai.

Program Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal

dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994).

Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward III (1980), menyebutnya : Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni : komunikasi, sumber daya manusia, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Oleh karena itulah implementasi kebijakan

mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kebijakan public.

SIP adalah pendidikan yang diikuti hanya oleh bintara senior berpangkat Aipda atau Aiptu dengan masa pendidikan sekitar 7 bulan. Jika lulus SIP, para bintara itu akan menjadi perwira pertama dengan pangkat Ipda. Proses inilah yang dimasa lalu dijadikan proyek suap internal. Polisi yang duduk sebagai penyelenggara seleksi memeras polisi bintara yang hendak bersekolah. Jeruk peras jeruk istilahnya.

Seleksi Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pada tahun 2018 telah selesai dilaksanakan oleh SSDM Polri. Jumlah siswa yang dinyatakan lolos sebanyak 1.300 dari 11.528 orang yang mendaftar dan mengikuti serangkaian seleksi. Dari 1.300 orang yang dinyatakan lolos terdiri dari 1.000 orang SIP reguler dan 300 orang SIP khusus penyidik.

Seluruh rangkaian seleksi dilakukan dengan ketat, transparan, dan obyektif untuk memilih calon perwira pertama Polri. Tak ada lagi cerita busuk itu lagi kini,, siswa yang lolos inilah yang kelak akan berperan sebagai first line supervisor di seluruh Indonesia. Proses yang obyektif ini merupakan bentuk kepedulian Polri untuk mencetak polisi yang tanggung dan dapat diandalkan. Semua hasil seleksi merupakan usaha dan kemampuan yang dimiliki siswa. Tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Dengan sistem yang ketat dan obyektif membuat para peserta percaya diri.

Dalam pelaksanaannya Polda Jawa Timur membentuk panitia daerah yang pada tahun 2018 berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, dan pemeriksaan administrasi (Rekmin). Selanjutnya kegiatan seleksi seperti tes psikologi (tes PSI), pemeriksaan kesehatan (RIKKES), tes kesemaptaan jasmani dan beladiri Polri, dan tes kompetensi manajerial di laksanakan oleh panitia pusat.

Adapun proses sosialisasi dalam penerimaan Sekolah Inspektur Polisi ini ditujukan kepada anggota Polri yang berada di satuan kerja (satker) atau satuan wilayah (satwil) masing-masing. Adapun Satker atau Satwil yang ada Polda Jatim adalah seluruh fungsi kepolisian tingkat dua di Jawa Timur dan Madura. Setelah Berita tentang pendaftaran ini diturunkan pada jajaran polres maka selanjutnya pihak polres akan melakukan share informasi pada tingkat polsek.

Pada tingkat Polsek akan diinformasikan kepada anggotanya sehingga semua polisi mendapatkan informasi ini.

Tidak hanya itu proses sosialisasi juga dilakukan melalui internet bahwa telah dibukanya kesempatan bagi anggota untuk menjadi siswa Sekolah Inspektur Polisi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan salah satu anggota panitia daerah SB yang juga bekerja bagian SDM Polda Jatim. SB mengatakan bahwa:

“.... kami sudah melakukan sosialisasi pada seluruh wilayah administrasi Polda Jatim. Beberapa informasi yang masuk selain polres, masing-masing polsek juga mensosialisasikan acara pengumuman ini dengan cara masing-masing. Tak lupa kami juga share informasi ini ke halaman web kami agar semua polisi tau info ini (wawancara Juli 2019).”

Pendaftar SIP bisa seorang Anggota Polri berpangkat minimal Bripta. Adapun anggota lain yang bisa mendaftar seperti Anggota yang sudah mengenyam pendidikan S3/S2 dengan masa dinas 0 tahun, Anggota yang sudah mengenyam pendidikan S1 atau D-IV dengan masa dinas 1 tahun, Anggota yang sudah pernah mengenyam pendidikan D3 dengan masa dinas minimal 2 tahun, dan yang terakhir adalah Anggota dengan pendidikan minimal SMA tetapi sudah memiliki masa dinas selama 3 tahun. Umur anggota yang

bisa mendaftar sebagai siswa SIP maksimal 26 tahun. Selain itu hal lain yang diperhatikan dalam seleksi adalah prestasi dan anggota itu sudah direkomendasikan oleh atasan.

Selain proses sosialisasi Polda Jatim juga melakukan seleksi administrasi pada peserta calon siswa Sekolah Inspektur Polisi. Proses seleksi ini dilakukan secara Online, namun jika terjadi kendala dalam jaringan dan lain-lain yang menyebabkan hal tersebut terhambat maka pendaftaran dan seleksi administrasi dilakukan di Polda Jatim.

Adapun proses Rekrutmen yang dilakukan oleh Polda sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan melalui website seleksi Online prndidikan pengembangan Polri TA 2018 yang beralamatkan di www.lekdik.polri.go.id . selanjutnya para peserta memilih seleksi digbang yang mereka akan ikuti.
2. Setelah para peserta mendaftarkan diri maka peserta akan mendapatkan hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Panitia daerah (Panda).
3. Verifikasi dilakukan setelah dua hari peserta mencetak form registrasi. Dan diserahkan kepada panitia (Polda)
4. Bagian yang dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi syarat diberikan bukti penyerahan berkas dan nomor ujian peserta tingkat Panda.
5. Apabila terjadi gangguan dan permasalahan dalam pendaftaran online maka peserta dapat langsung mendaftar di sekretarian Panda dengan membawa berkas administrasi lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setelah proses itu selesai maka tugas Panda adalah mengirimkan hasil pemeriksaan administrasi peserta seleksi SIP yang ditunjuk oleh Panda.

Mengirimkan hasil setiap tahapan seleksi secara online dengan mengupload melalui website atau email. Mengirimkan hasil scan dan berita acara hasil kelulusan tahapan seleksi. Berkas seleksi tersebut dikirim ke Panitia pusat (Panpus).

Jika ditinjau dari teori yang disampaikan oleh Korten, ada tiga unsur yang membuat implementasi panitia SIP ini dikatakan berhasil. Pertama, peran panitia yang memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota di wilayah/satuan kerjanya untuk mengikuti seleksi SIP sudah terlaksanakan dengan baik. Hal ini berarti penyampaian informasi sama dengan kebutuhan dilapangan. Kedua, program rekrutment SIP yang diemban Polda berupa Pendaftaran, dan Rekrutmen telah di jalankan dengan baik. Pengiriman berkas hasil seleksi ke Panpu juga sudah dilaksanankan.. Ketiga, telah terpilihnya peserta menjadi siswa SIP sangat bermanfaat bagi lembaga tempat siswa tersebut bertugas. Hal ini mengisaratkan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan seleksi Sekolah Inspektur Polisi yang diadakan di Polda Jatim berjalan dengan lancar. Tugas yang diberikan oleh panittia pusat berupa sosialisasi, pendaftaran, dan pemeriksaan berkas. Untuk selanjutnya akan ditangani penitia pusat dan tugas panitia daerah membantu membuat laporan kegiatan.
2. Proses sosialisasi berjalan dengan baik, namun kendala yang cukup berarti ada pada sistem jaringan internet yلمان pendaftaran. Web tidak dapat dibuka ketika mendekati penutupan

pendaftaran. Hal ini menyebabkan harus dibukanya pendaftaran off line. Sementara itu proses seleksi rekmin tahun 2018 lebih ketat dari tahun sebelumnya.

3. Persiapan seperti sumberdaya, sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, komunikasi, dan lingkungan perlu ditambah lagi. Terutama dalam sumberdaya IT agar tahun depan bisa online 100%

Saran

1. Perlu adanya persiapan yang matang dalam hal pendaftaran SIP terutama sektor IT
2. Bagi Polda terkait, apabila mengalami gangguan online dan harus melakukan pendaftaran offline sebaiknya pengumuman yang diberikan tidak mendadak agar tidak ada peserta yang gugur atas masalah tersebut.
3. Penelitian ini hanya membahas kegiatan dari segi pelaksana saja. Untuk penelitian selanjutnya perlu diberikan penilaian secara kualitatif dari hasil angket yang disebar.
4. Proses seleksi khususnya kesehatan dan jasmani harus menghitung skema waktu serta jumlah peserta, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi. 2007. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Edward III, George C (edited), 2007, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- Berita satu, 2018, Tes Solah Ispektur Polisi. Diakses tanggal 15 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.
<https://www.beritasatu.com/nasional/481320/tes-sekolah-inspektur->

polisi-tak-ada-lagi-jeruk-peras-jeruk

Grindle, Merilee S. 2007. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.

Korten, David C dan Syahrir. 2007. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 2007. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Steers Richard. M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta, Bandung.

Wahab, Solichin A. 1997. *Analisis Kebijakan*